

## Gereja dalam Keragaman dan Keharmonisan: Studi Sosioteologis Merawat Kerukunan Hidup Beragama

Jefrie Walean

Sekolah Tinggi Teologi Bala Keselamatan Palu, Sulawesi Tengah

Correspondence: [jefrywalean@gmail.com](mailto:jefrywalean@gmail.com)

### Abstract

*This article examines inter-religious relations based on tolerance, mutual understanding and mutual respect in the practice of religious teachings and cooperation in social life. Religious harmony is determined by two factors, namely the behavior of religious people and state/government policies that are conducive to harmony. All religions teach religious harmony so that it functions as an integrative factor. Indonesia is a pluralistic nation consisting of various tribes, religions and races, but is known as a friendly and tolerant nation, including in terms of religious life. This study aims to present a sociological portrait of Indonesian society in carrying out religious activities. This research uses a qualitative approach and collects data through literature study. In this study it was found that the relationship between religious adherents in Indonesia has been very harmonious but in the reform era which incidentally supported freedom, various expressions of freedom emerged in the form of thoughts, political ideologies, religious beliefs, as well as in expressions of human rights. The urgency of opening a public dialogue space between the government and interfaith leaders is a necessity to maintain inter-religious harmony. Conflicts that occur between religious people are not purely caused by religious factors, but by political, economic or other factors which are then associated with religion. The conclusion of this research is that cultural diversity, language does not prevent church participation in creating a civil society that consistently applies democratic principles and respects the plurality of society. Efforts to make it happen is a necessity.*

*Keywords: church; diversity; harmony; religious harmony*

### Abstrak

Artikel ini mengkaji hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan umat beragama itu ditentukan oleh dua faktor yaitu perilaku umat beragama dan kebijakan negara/pemerintah yang kondusif bagi kerukunan. Semua agama mengajarkan kerukunan beragama sehingga berfungsi sebagai faktor integratif. Penelitian ini bertujuan menampilkan potret sosiologis masyarakat Indonesia dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data-data melalui studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa relasi antar pemeluk agama di Indonesia selama ini sangat harmonis namun di era reformasi yang notabene mendukung kebebasan muncul berbagai ekspresi kebebasan dalam bentuk pikiran, ideologi politik, faham keagamaan, maupun dalam ekspresi hak-hak asasi. Urgensi terbukanya ruang dialog publik pemerintah dan tokoh lintas agama adalah keniscayaan untuk merawat kerukunan hidup antar umat beragama. Konflik yang terjadi antar-umat beragama tidak murni disebabkan oleh faktor agama, tetapi oleh faktor politik, ekonomi atau lainnya yang kemudian dikaitkan dengan agama. Simpulan dari penelitian ini adalah keragaman budaya, bahasa tidak menghalangi partisipasi gereja untuk mewujudkan masyarakat madani yang konsisten menjalankan prinsip demokratis serta menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat.

Kata kunci: gereja; keharmonisan; keragaman; kerukunan beragama

## PENDAHULUAN

Membahas tentang kerukunan dalam perspektif universalisme akan menjadi indah jika *common sense* ditempatkan dalam frame equalitas humanitas. Mengapa menjadi urgen? Untuk mengkaji lebih substansif dan reflektif maka kedalaman memandang manusia sebagai makhluk sosial menjadi ukuran. Kerukunan adalah proses terciptanya relasi-relasi sosial keagamaan untuk hidup berdampingan secara aman tenteram. Dalam konteks toleransi, sejatinya posisi tawar agama cenderung *hybrid* sehingga beragama masuk dalam adaptasi hal positif yang mengutamakan equalitas dan menyamakan apa yang sama dari agama-agama lain. Analoginya demikian, kendaraan roda dua saya bermerek Yamaha. Tetapi karena pabrik sparepart motor telah mengeluarkan jenis-jenis asesoris yang mirip bahkan sama maka jika salah satu onderdil harus diganti maka tetap disebut merek Yamaha. Equalitas agama yang berbasis toleransi memiliki karakteristik dan perilaku yang positif sehingga dapat terjalin komunikasi. Dalam suatu kesempatan, Romo Mangun menyapa Gus Dur memiliki karakteristik seorang Katolik hanya saja Gus Dur tidak dibaptis. Perilaku Gus Dur dianggap merepresentasikan nilai-nilai yang diajarkan Yesus Kristus. Namun dalam kesempatan lainnya, Gus Dur menyapa Romo Mangun seorang muslim tetapi tidak menyampaikan syahadat. Intinya bahwa agama-agama dalam bingkai Pancasila sepatutnya saling menghormati serta memberi ruang yang setara bagi pemeluk agama lain. Agama mengundang kritik sosial yang tajam karena agama tidak pernah dapat direduksikan menjadi sekumpulan dogma yang dimengerti secara mekanik<sup>1</sup> Bertolak dari asumsi Robert Ackermann, agama-agama memang “agak” sulit dipersepsikan sebagai ilmu pengetahuan yang natural. Hal ini dipahami bahwa sulit memahami pesan-pesan agama yang lebih filosofis imanensi secara ilmiah. Inilah yang membuat ilmu pengetahuan sulit menerima agama sebagai epistemology yang universal. Agama sebagai kritik juga berlaku pada agama Kristen khususnya tidak luput dari kritik sosial karena cirri eksklusifisme. Namun agama juga dapat menjadi kontrol sosial. Studi komparasi agama dengan kritik-kritik sosial mengindikasikan bahwa ada hal yang parsial yang penting untuk dikaji. Robert John menulis:

Dulu ilmu pengetahuan dan agama pernah berkompromi dengan menyepakati bahwa adanya pencipta atau kemungkinan adanya pencipta dapat ditentukan dengan pembacaan seksama atas alam raya, sedangkan seluk beluk pencipta diuraikan dalam konteks iman. Sedangkan seluk beluk alam raya lebih banyak dipercayakan kepada ilmu pengetahuan dalam lingkup filosofis. Dalam pandangan filosofis, pengetahuan ilmiah telah menggantikan pengetahuan religius<sup>2</sup>

Parsialisme ini menjadikan agama harus dilihat sebagai pesan-pesan filosofis imanensi. Menurut Robert John “dalam tataran teologi, tradisi agama memajukan keyakinan dan sikap yang berlainan pada tingkat abstraksi”<sup>3</sup> Ajaran Agama seharusnya berorientasi perubahan karakter umatnya bukan fanatisme agama. Kerukunan umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan dalam beragama ditentukan oleh dua faktor yakni sikap dan perilaku dalam beragama serta kebijakan negara atau pemerintah yang kondusif. Sherien Sabbah, Paramita Ayuningtyas menulis

---

<sup>1</sup> Robert John Achermen, *Agama Sebagai Kritik*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), 5

<sup>2</sup> Ibid., 12

<sup>3</sup> Ibid., 37

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan perbedaan baik dari segi etnisitas, budaya, agama dan bahasa. Istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini adalah masyarakat multikultural atau plural. Kondisi keberagaman budaya ini sering menimbulkan konflik karena pemahaman atau pemikiran yang bertentangan dengan ideologi multikulturalisme yang merayakan keberagaman dengan memahami budaya sebagai entitas yang cair atau tidak berbatas tegas.<sup>4</sup>

Kerukunan beragama didefinisikan keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna *baik* dan *damai*. Marinda Wiwi Isnaini, M.Ds. Agustina Kusuma Dewi menulis

Toleransi adalah membiarkan orang lain berpendapat lain, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita, tanpa kita ganggu ataupun intimidasi. Istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu lingkungan.<sup>5</sup>

Harudin<sup>1</sup>, Khaidir, H. Rodja Abdul Natsir menulis

Komitmen hidup secara berdampingan tanpa mempersoalkan agama merupakan dambaan yang sejati. Hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Demi suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, kerukunan, toleransi dan harmoni antar umat beragama sehingga tercipta stabilitas nasional yang dinamis.<sup>6</sup>

Kerukunan merupakan kebutuhan bersama yang tidak dapat dihindarkan di tengah perbedaan. Dalam konteks Indonesia, kerukunan hidup beragama secara umum relatif kondusif. Tetapi kerukunan mulai mengalami pergeseran ditandai adanya sindirsindiran yang terekspos di media sosial yang intinya menyinggung serta menghina keyakinan agama lain. Delfiyan Widiyanto menulis

Kenyataan kemajemukan menjadi aset bangsa bentuk dari kerifan lokal dapat dikelola untuk memperkokoh integritas nasional. Keragaman menjadi sebuah perbedaan yang mampu menyebabkan konflik dan disintegritas bangsa. Perselisihan yang terdapat di masyarakat berdasar pada isu (SARA) suku, agama, ras, dan antargolongan. Perbedaan SARA dapat menimbulkan perselisihan antarkelompok maupun individu.<sup>7</sup>

Usaha riil merawat kerukunan hidup beragama sejatinya harus menjadi kalimat perintah bagi semua warga negara untuk bersepakat menjaga kerukunan hidup beragama. Tokoh agama beserta penganutnya (jemaat/jamaah) harus berkomitmen

---

<sup>4</sup> Sherien Sabbah, Paramita Ayuningtyas, Pemahaman Identitas dan Toleransi Keberagaman Budaya Mahasiswa Sastra Inggris UAI Melalui Puisi Multikultural Kesusasteraan Inggris: Sebuah Kajian Multikulturalism, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2, September 2017, 96

<sup>5</sup> Marinda Wiwi Isnaini, M.Ds. Agustina Kusuma Dewi, S.Sos, M.Ds. Meningkatkan Pemahaman Tentang Penerapan Toleransi Bereagama Pada Anak Sekolah Dasar Melalui Buku Interaktif, *Jurnal Rekamakta PPN Institut Teknologi Nasional*, 2

<sup>6</sup> M. Harudin<sup>1</sup>, Khaidir, H. Rodja Abdul Natsir, MERAWAT KEBERAGAMAN MENJAGA TOLERANSI MENEROPONG PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SIKKA, *Academy of Education Journal* Vol. 11 No 2 Tahun 2020, 168

<sup>7</sup> Delfiyan Widiyanto, Pembelajaran Toleransi dan Keragaman dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* p-ISSN 2598-5973 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta e-ISSN 2599-008X 109

hidup rukun dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk mengurangi perpecahan. Chazali H. Situmorang menulis:

Ada apa dengan toleransi-intoleransi, dan kemajemukan kultur (multikultural), dalam kehidupan nasionalisme kita (berbangsa dan bernegara). Apa benar konsep toleran dan intoleran berkaitan dengan bilangan besar dan bilangan kecil. Apakah ada hubungan dan bagaimana hubungannya antara toleran-intoleran, multi-kultural dengan situasi ekonomi dan pergeseran nilai-nilai budaya dan agama bangsa ini. Bagaimana juga kaitannya dengan kesenjangan sosial, partisipasi sosial, integrasi sosial, kesalehan sosial dan keadilan sosial yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kecemburuan sosial, konflik sosial, pada ujung-nya terkait kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia. *Welfare State* merupakan suatu keniscayaan yang diamanatkan kepada negara ini sesuai dengan konstitusi.<sup>8</sup>

Indonesia telah lama menampilkan "*wajah toleransi*" kerukunan antar warga sekalipun sejarah mencatat bahwa tindakan intoleransi masih saja terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Kerukunan hidup beragama di Indonesia bertujuan agar kondisi sosial semua golongan agama bisa hidup bersama melaksanakan kewajiban agamanya. Mencapai wajah toleransi sejatinya harus meminimalkan friksi dan *miss* komunikasi dengan pihak agama lain. Konflik yang terjadi antara umat beragama dalam masyarakat multikultural menjadi tantangan bagi masyarakat maupun pemerintah jika konflik tidak dikelola secara baik dan benar. Fakta sejarah mencatat bahwa terjadi seretetan konflik antar umat kristiani dan muslim di Ambon lalu merembet ke Poso, kemudian disusul dengan pengrusakan dan pengeboman beberapa tempat ibadah dan konflik antar suku dan ras di wilayah di sejumlah wilayah di Indonesia. Hidup bersama dalam masyarakat dengan "kesatuan hati" dan "bersepakat" merupakan keniscayaan yang wajib diusahakan dan konsekwen. Kerukunan beragama merupakan kebutuhan bersama yang tidak yang tidak dihindarkan ditengah perbedaan dalam konteks Indonesia. Muhammad Sabri menulis

Mengenai hubungan Kristen dan Islam Alwi Shihab berpandangan bahwa Islam dan Kristen telah bersentuhan lebih dari 14 abad. Buktinya adalah terjadinya perubahan dan adanya hubungan kebudayaan keduanya. Hubungan ini juga berdampak kepada terjadinya konfrontasi dan kerja sama yang produktif. Namun dengan isu keimanan juga terjadi permusuhan dan kebencian.<sup>9</sup>

Konflik doktrinal antar agama yang sudah terjadi selama berabad-abad harus segera disudahi. Penolakan perilaku fanatisme dan primordialisme harus bersifat otentik dan dinamis sebagai wajah agama damai dan perilaku santun. Sekalipun sejarah mencatat bahwa tindakan intoleransi masih saja terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Mencapai "titik" kerukunan hidup beragama memerlukan proses waktu dan dialog terbuka, menerima dan menghargai sesama. Perbedaan yang ada bukan merupakan penghalang untuk hidup rukun dan berdampingan dalam bingkai persaudaraan dan persatuan. Kesadaran akan kerukunan hidup umat beragama harus bersifat dinamis, humanis dan demokratis. Amir Abdullah menulis

Dinamika sosial politik dan keagamaan di negara-negara lain, lebih-lebih difasilitasi oleh media sosial elektronik seperti saat sekarang ini juga sangat berpengaruh dan mempengaruhi dinamika sosial-politik-keagamaan ditanah air. Badai gurun pasir alQaeda, Taliban dan ISIS dari Timur Tengah selama 25 tahun terakhir belum ada

---

<sup>8</sup> Chazali H. Situmorang, [jurnalsosialsecurity.com/news/toleransi-intoleransi-multikultural-sebagiaifatamorgana-kehidupan](http://jurnalsosialsecurity.com/news/toleransi-intoleransi-multikultural-sebagiaifatamorgana-kehidupan)

<sup>9</sup> Muhammad Sabri, Nofri Andy. TOLERANSI ANTAR UMMAT BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HADIST, IAIN Bukittinggi, IAIN Bukittinggi, 20

tanda-tanda akan mereda. Geopolitik nasional dan internasional terus berubah dan bergolak dan bergejolak secara dinamis dan itu berpengaruh besar pada ketahanan mental beragama dan berpolitik rakyat dan bangsa Indonesia. Debu-debu panas pergolakan sosial politik dan sosial agama di negara-negara lain juga ikut bertebaran di mana-mana di tanah air. Menjelang dan sesudah terbentuknya orde Reformasi (1998) terjadi serentetan konflik antar umat Kristiani dan Muslim di Ambon, lalu merembet ke Poso; kemudian disusul dengan pengrusakan dan pengeboman beberapa tempat ibadah dan konflik antar suku dan ras seperti di wilayah Kalimantan Barat dan wilayah Papua. Tahun 2001, terjadi peristiwa penghancuran dan runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) New York, disusul tahun 2002 bom Bali I dan tahun 2005 bom Bali II di Indonesia dan peristiwa peledakan bom di berbagai negara yang lain, maka sekarangpun dunia masih dibayang-bayangi oleh gerakan al-Qaeda dan belakangan disusul dengan deklarasi pembentukan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang sebagian pendukungnya adalah juga warga Indonesia<sup>9</sup>

Peristiwa-peristiwa yang dijabarkan di atas mengindikasikan bahwa urgensi memelihara kerukunan antar anak bangsa merupakan keniscayaan. Sejatinya semua agama mengajarkan kerukunan universal sehingga agama idealnya berfungsi sebagai faktor integratif. Kerukunan hidup beragama memberi ruang untuk berkomunikasi secara konstruktif tanpa meninggalkan kepercayaan secara inklusi. Perilaku toleransi mengajarkan masyarakat bersikap *“open”* menerima segala perbedaan doktrin agama-agama. Toleransi yang ideal dapat diaktualisasikan melalui sikap saling menghormati dalam menjalankan peribadatan. Kerukunan hidup antar umat beragama sejatinya dapat menghindari konflik internal agama dan eksternal agama. Pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong menolong dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Event-event dialog antar-umat beragama dapat memperkuat tali silaturahmi sehingga memperkuat persaudaraan. Indikator kerukunan akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan yang berdampak kepada kesejahteraan dan rasa aman untuk tinggal dan bersahabat dengan orang lain di suatu tempat tanpa ada gangguan-gangguan. Weinata Sairin menulis

Kerukunan antar umat beragama menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diwujudkan dan satu satunya pilihan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kerukunan yang kita kembangkan bukanlah kerukunan artificial yang sekadar dibuat-buat atau kerukunan yang bersifat verbalistik semantic (hanya berucap dalam pidato-pidato) tetapi kerukunan yang benar-benar otentik dan dinamis yang bertolak dari refleksi dari ajaran agama yang kita anut<sup>10</sup>

Dalam rangka mensukseskan kerukunan antar umat beragama, diperlukan komunikasi yang intens serta harmonis sehingga dapat menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman disintegrasi yang diakibatkan oleh konflik agama. Salah satu pemikir Islam yaitu Quraish Shihab dalam artikel yang diselenggarakan Litbang PGI memberikan pendapat terhadap munculnya pandangan-pandangan agama tertentu sehingga ideology politik dan teologi harus dipandang secara bijaksana. Menurut Quraish *“terbentuknya pintu reaktualisasi mengantarkan pada terbukanya kemungkinan*

---

<sup>9</sup> Jurnal, *Menengok Kembali Peran Agama Di Ruang Publik* Oleh Amin Abdullah (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2017/Issn: 1978-4457 (P), 2548-477x (O))

<sup>10</sup> Weinata Sairin, *Gereja, Agama-Agama Dan Pembangunan Nasional*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000) 27

adanya penafsiran baru bagi keyakinan dan pelaksanaan agama<sup>11</sup> Perlu awasan bagi semua pihak bahwa ancaman sikap primordialisme yang berlebihan dan fanatisme sesungguhnya menjadi ancaman serius sekaligus menghambat terciptanya iklim sejuk menuju masyarakat madani. Sikap toleransi orang-orang percaya dan setiap orang percaya yang tentunya akan menerima dan menghargai orang lain dengan perbedaan keyakinan bahkan dapat memberitakan kabar keselamatan sebagai bukti mengasihi Allah dan sesama<sup>12</sup>

Perjumpaan agama-agama diharapkan mewujudkan kehidupan yang damai diantara pemeluk agama yang berbeda. *Upgrade* hubungan agama-agama selalu dinamis menuju arah trend positif seiring dengan arus modernisasi dan globalisasi. Sekat-sekat agamistis mulai dibuka untuk dilihat dan melihat bilik agama lain tanpa curiga.

### **Kerukunan Beragama dalam Bingkai Pancasila**

Eksistensi Pancasila di Indonesia menyuguhkan potret bingkai Indonesia raya. Pancasila berperan sebagai pemersatu masyarakat yang multikultural di Indonesia. Negara dalam frame Pancasila tidak mengenal sebutan negara agama tertentu karena Pancasila menjadi payung besar secara juridis agama-agama yang diakui. Weinata Sairin menulis "Negara Pancasila tidak mengenal "negara agama" atau agama Negara. Pandangan tentang Pancasila mengandung dua aspek mendasar yaitu bahwa tidak ada pemisahan yang mutlak antara Negara dan agama dan bahwa Negara tidak dapat begitu saja mengatur dan campur tangan terhadap bidang-bidang yang menjadi bagian dan tanggungjawab agama"<sup>13</sup> Weinata berkata bahwa "Berbicara tentang Perjanjian Lama moralitas agama dalam konteks Negara Republik Indonesia berpancasila, maka mau tidak mau kita harus merujuk pada sila ke-1 yaitu ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila"<sup>14</sup> Menurut John A. Titaley, bahwa Naskah pembukaan (preamble) yang kemudian dianggap sebagai suatu kesepakatan yang tinggi di antara pendukung paham nasionalis dan pendukung Islam<sup>15</sup> selanjutnya diuraikan John Titaley bahwa Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai identitas baru didirikan oleh masyarakat yang memiliki identitas primordial untuk mencapai kesatuan sebagai suatu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa "Pancasila menggambarkan Realitas Indonesia"<sup>16</sup> John Titaley juga menegaskan bahwa UUD 1945 mengakui dan menghormati pluralisme hukum dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Departemen Agama RI, dalam buku "*Bingkai Teologi*" mengatakan bahwa "Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang beragama. Setiap warga Negara bebas memilih agama yang diyakininya sebagai agama yang paling tepat untuk dianut dalam

---

<sup>11</sup> Litbang PGI, Quraish Shihab, "*Meretas Jalan Teologi Agama-Agama Di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999) 138

<sup>12</sup> Mario Chief Taliwuna dan Veydy Yanto Mangantibe, *Toleransi Beragama Sebagai Pendekatan Misi Kristen Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH) Volume 3, Nomor 1, (Juni, 2021): 33-47 ISSN: 2685-1393(p); ISSN:2685-1466 halaman 42

<sup>13</sup> Weinata Sairin, *Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002) 9

<sup>14</sup> *Ibid.*, 47

<sup>15</sup> M. Aqil Irham, *PENGAMANAN PILAR BANGSA DAN MASA DEPAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 6 Nomor 1, Juni 2012:182-125

<sup>16</sup> Angel Ch. Latuheru, Izak Y. M. Lattu, Tony R. Tampake, *PANCASILA SEBAGAI TEKS DIALOG LINTAS AGAMA DALAM PERSPEKTIF HANS-GEORG GADAMER DAN HANS KUNG* *Jurnal Filsafat*, ISSN: 0853-1870 (print); 2528-6811(online) Vol. 30, No. 2 (2020), p. 150-180, doi: 10.22146/jf.49193

<sup>17</sup> Siti Jahroh: *Politik Keagamaan di Indonesia*, [ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id), 222

kehidupannya dan pemerintah menjamin kebebasan beragama tersebut (pasal 29 ayat 1,2) Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan hukum serta pandangan hidup bangsa. Sila pertama ketuhanan yang maha esa sangat memberi inspiratif bahwa Negara Indoneisia adalah Negara religius terbesar di dunia. Kansil dalam buku *"Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara"* mengatakan bahwa

Alasan sosiologis untuk mengokohkan kerukunan dalam bidang agama ialah pembangunan hidup nasional, yang tidak boleh ditunda-tunda dan tidak boleh diganggu oleh perselisihan karena agama. Dari kerukunan dalam bidang agama, diharapkan lahir pengaruh baik pada pembangunan dalam arti umum<sup>18</sup>

Victor Tanya menuliskan bahwa "Sila ke-1 ini adalah gagasan politik dan oleh sebab itu maksudnya adalah didalam setiap agama para pemeluknya Tuhan yang maha esa menurut pandangan agama masing-masing. Keesan ini perlu dipegang untuk menghindari adanya kompromi aqidah<sup>19</sup> Suwarno menulis bahwa "Pancasila sudah mengalami proses yaitu dari pancasila material menjadi Pancasila forma yang dapat dikatakan sebagai hasil pembudayaan masyarakat Indonesia dan dari pancasila formal akan dijabarkan lagi menjadi pedoman hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam Negara Indonesia merdeka<sup>20</sup> Selanjutnya analisa Suwarno "perihal transformasi Pancasila dalam hidup bermasyarakat

Hidup bermasyarakat ialah hidup bersama. Kehidupan ini dapat dilihat dari beberapa segi ekonomi menampakkan kegiatan berproduksi pembagian dan penggunaan barang dan jasa segi kehidupan politik menampakkan kegiatan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam kehidupan bersama Nampak unsur-unsur sosiologi<sup>21</sup>

Pidato kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 16-8-1975 menegaskan tentang Pancasila bahwa "Saya mengajak masyarakat luas untuk memikirkan dan mengusahakan rumusan-rumusan penjabaran Pancasila itu yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga mudah dihayati dan diamalkan oleh rakyat Indonesia<sup>22</sup> Solarso Sopater menulis

Dalam zaman Indonesia merdeka ini dalam iklim Pancasila dimana kerukunan hidup beragama dijadikan sendi dasar hidup bermasyarakat umat Perjanjian Lama naturalistis sifatnya, pastilah gereja-gereja di Indonesia dapat belajar dari pengalaman sejarah dalam mengembangkan sikap yang positif.<sup>23</sup>

Memahami konteks Indonesia maka diharapkan perjumpaan agama-agama dalam kerangka kbinekaan Pancasila dapat menjadi katalisator perwujudan masyarakat madani. Wacana mengubah Pancasila berpotensi terjadi friksi dikalangan masyarakat parlemen, masyarakat akademis, masyarakat secara umum. Finalitas Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus dipertahankan. Dengan demikian posisi Pancasila dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia telah terbukti dan teruji sebagai pemersatu bangsa. Middy Boty menulis sebagai berikut

---

<sup>18</sup> Christine Kansil, *Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 195

<sup>19</sup> Tanya, 47

<sup>20</sup> Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia.*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 67

<sup>21</sup> Ibid., 133

<sup>22</sup> Lihat Buku: *Pandangan Presiden Sukarno Tentang Pancasila*, (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1976, Sekertariat Negara RI)

<sup>23</sup> Solarso Sopater, *Inti Ajaran Aliran Valentinian*, (Bandung: Bina Media Informasi, 2011), 208

Bahwa sesama manusia apapun agamanya sebaiknya saling hormat menghormati, itu adalah suatu kewajiban. Namun tidak berarti perbedaan agama tidak perlu dibahas, karena inti ajaran beragama adalah menyembah kepada Tuhan yang benar bukan kepada Tuhan yang lain. Agama yang baik adalah agama yang menuhankan Tuhan yang sebenarnya dan bukan menuhankan manusia, bukan menuhankan uang dan bukan menuhankan makhluk-makhluk lainnya<sup>24</sup> Karakteristik masyarakat madani adalah interaksi yang harmonis di ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Setiap warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. Warga negara memiliki kebebasan penuh untuk meyakinkan aktifitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungannya.

### Intoleransi dan Kemajemukan

Memposisikan agama dalam kajian holistik harus ditempatkan pada proporsinya yaitu sebagai "hak pribadi" dan berbeda dengan hak-hak yang lain misalnya hak politik. Untuk menjaga independensi maka agama dan politik tidak boleh dicampur adukkan dengan hak politik, budaya karena berpotensi terjadi konflik kepentingan. Bisa dibayangkan jika kekuatan politik menguasai hak beragama orang lain maka bisa terjadi "pemaksaan" secara administratif berdasarkan politik identitas. Pemaksaan dapat memicu perilaku intoleransi yang sangat membahayakan keutuhan berbangsa dan bernegara. Secara sosiologis, terdapat peristiwa-peristiwa perlakuan intoleransi dalam komponen anak bangsa padahal secara hukum terdapat produk hukum yang mengatur hak beragama setiap orang. Setiap kajian religi berusaha memberikan pemahaman tentang muatan-muatan teologi yang dianut suatu agama sebagai dasar perikehidupan. Menjamurnya berbagai institusi dan kelompok keagamaan di Indonesia, tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan budaya toleransi dan silaturahmi. Eksistensi partai politik yang berbasis agama berpotensi menciptakan ruang-ruang tertutup, eksklusif dan intoleran.

Intoleransi mengalami pergeseran makna melegitimasi primordialisme. Disisi lain konteks kebinekaan, tindakan intoleransi menjadi "musuh" akut sehingga tidak boleh tumbuh dinegeri yang bernama nusantara. Peristiwa intoleransi merusak tatanan yang sudah disepakati dalam bingkai Pancasila. Tokoh masyarakat harus memberikan pemahaman secara jujur untuk mengarahkan umatnya untuk tidak terpancing terhadap isu-isu yang menyesatkan sehingga menyuburkan sikap *underestimate* Terkait dengan persoalan agama, munculnya sikap keagamaan secara radikal sering terjadi tindakan intoleran pada sebagian kecil kelompok agama dengan dalih penodaan agama/penistaan agama. Menurut Shofiah Fitriani bahwa "Toleransi sebenarnya bukan hanya sekedar menerima perbedaan tetapi saling mengakui, saling terbuka, dan saling mengerti adanya perbedaan dan tidak mempersoalkan perbedaan tersebut meski mereka tidak sepakat"<sup>25</sup> Di sisi lain, persoalan pendirian rumah ibadah merupakan faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau sikap intoleransi. Sumartana menulis

Pengalaman dialog bukan hal baru dimasyarakat kita, juga bukan hal yang sama sekali baru dalam hubungan antar agama. Namun ketika kita didorong untuk

---

<sup>24</sup> Jurnal Istinbath Nomor 15/Th.Xiv/201535-50: *Agama Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosilogi Agama)* Middy Boty Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

<sup>25</sup> Shofiah Fitriani, *Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama Analisis: Jurnal Studi Keislaman* Volume 20, No. 2, Tahun 2020 180-181



merumuskan gagasan secara sistimatis mengenai dialog, ia muncul sebagai sebuah tantangan yang baru. Karakteristik dari dialog merupakan suatu percakapan antara dua pihak atau lebih yang mengandung unsur keterbukaan, sikap kritis dan upaya untuk saling mendengar, saling belajar dan memahami orang lain secara mendalam<sup>26</sup>

Keberagaman agama yang ada di Indonesia merupakan identitas “natural” yang menjadi ikon bangsa Indonesia. Keragaman tersebut dibingkai dalam Negara kesatuan dan mendapat perlindungan hukum. Pluralisme dimulai dari semangat pencerahan dan perlawanan terhadap otoritas gereja dan agama tradisional, di mana pluralisme pada tingkat filosofi gencar dikumandangkan oleh beberapa teolog Kristen untuk mengapresiasi agama-agama di luar Kekristenan baik itu agama kitab atau wahyu (Yahudi, Islam) maupun agama-agama Timur lainnya seperti Konfusianisme. Menurut kaum pluralis, hal yang sering terlihat sebagai akibat dari hidup bersama secara majemuk adalah bahwa agama Kristen dalam upaya mengklaim kebenaran yang satu-satunya, akhirnya menjadi upaya penghakiman agama sehingga memutuskan hubungan antaragama. Alasan yang dikemukakan antara lain adalah, apabila berbicara tentang membangun jembatan kerjasama antaragama, benturan utama yang paling sering menghambat kebersamaan agama-agama dalam kesatuan adalah berhubungan dengan ajaran Trinitas dalam agama Kristen.<sup>27</sup>

Keberagaman merupakan rahmat yang harus dipelihara bersama oleh komponen bangsa karena keberagaman “menutup” pemaksaan dogma kepada pihak lain.

Abdurahman Wahid menulis lawan besar bagi perkembangan seperti itu adalah paham kebangsaan yang bertumpu pada pluralisasi. Pluralis factor-faktor kehidupan itu terutama berbentuk penyamaan hak-hak dan status antara golongan mayoritas dan golongan minoritas agama dalam kehidupan bangsa. Masyarakat yang mengalami proses pluralisasi tentu saja menolak pemberlakuan syariah sebagai sistim perundangan-undangan nasional, menekan diri pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memiliki objektivitas sangat tinggi dalam perlakuannya terhadap semua warga Negara tanpa melihat asal usul keagamaan atas etnis mereka<sup>29</sup>

Secara *defacto* bahwa pengakuan atas negara meliputi pemerintah yang berdaulat, ada rakyat dalam wilayah hunian yang jelas. Dejure bahwa adanya pengakuan hukum dunia internasional yang mengakui bahwa Indonesia adalah negara berdaulat dan tidak ada penjajahan. Pengakuan sosiologis memberikan kekuatan bahwa masyarakat dibentuk dari kesepakatan identitas dan bersepakat saling menerima dari semua kepelbagaian. Dalam rangka mengsucceskan kerukunan antarumat beragama diperlukan komunikasi yang intens serta harmonis sehingga dapat menciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman disintergrasi yang diakibatkan oleh konflik agama.

### Fenomena Kebangkitan Agama

Fenomena kebangkitan agama tertentu mengandung dimensi-dimensi antagonisme yang memicu disintergrasi di sektor profesi, cendekiawan, elite politik sampai masyarakat marginal. Kebangkitan agama-agama memiliki efek terhadap perubahan perilaku beragama sehingga menjadi suatu kekuatan yang kuat untuk mempertahankan

<sup>26</sup> Abdurahman Wahid Dkk, Dialog: Kritik Dan Identitas Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Xxi

<sup>27</sup> Fanny Yapi Markus Kaseke, subordinasi Allah Tritunggal dalam pengajaran pluralisme, *Missio Ecclesiae* Volume 10, Nomor 1, (April, 2021)68 *Missio Ecclesiae* ISSN 2086-5368 (Print)ISSN 2086-5368 (Online)<https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/meVol.10, No.1, pp. 68-82, 2021> <sup>29</sup> Abdurahman Wahid Dkk, 9-10

kekuasaan sosial atas nama agama. Hal itu akan menjadi sangat kuat sehingga bisa menjadi alat kekuasaan sekunder yang mengarah kepada mempertahankan status quo. Secara doctrinal perbedaan semua ajaran agama berpotensi terjadinya gesekan atau friksi. Kebangkitan penghayatan terhadap agama sering terjebak kepada fanatisme beragama yang kaku sehingga memicu konflik horizontal. Akselerasi dari kebangkitan agama-agama memiliki efek terhadap perubahan perilaku beragama sehingga menjadi suatu kekuatan yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan sosial atas nama agama. Perilaku fanatisme doktrinal cenderung melemahkan nilai agama lain. Bahkan perilaku itu menumbuhkan antagonisme yang memanfaatkan syiar” dan dakwah agama secara frontal melemahkan agama lain. Faktanya kebangkitan agama memasuki tahap akulturasi dan adaptasi ditengah masyarakat. Akibatnya perbedaan doktrinal ajaran agama berpotensi terjadinya gesekan atau friksi.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan naturalistik-kualitatif berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya) Proses penelitian dilakukan dalam situasi alami (natural setting) Dari hasil pengumpulan data kepustakaan, observasi, wawancara, diperoleh data bahwa gereja dalam keragaman dan keharmonisan memiliki perspektif dalam eksistensinya di negara Indonesia. Faktor keragaman yang menjadi wajah Indonesia yang sepatutnya menjadi isu kemajemukan yang pantas di negara Pancasila. Pemahaman keharmonisan dalam masyarakat adalah ujung tombak. Pluralisme harus ditempatkan secara proporsional agar tidak disalahtafsirkan oleh kelompok intoleran. Perilaku nasionalisme merupakan syarat warga negara di Indonesia. Pendekatan naturalistik- kualitatif digunakan untuk mendapatkan dasar filosofi bahwa Pancasila sudah final bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **PEMBAHASAN**

### **Perspektif Alkitabiah sebagai Warga Negara**

Alkitab mengajarkan untuk menghormati pemerintah dan menghormati orang lain. Yesus berkata bahwa apa yang engkau perbuat kepada saudaramu yang terkecil dan hina maka engkau akan mendapat ganjaran dalam kerajaan sorga. Salah satu pengajaran Yesus dalam Matius 22:21 ketika Yesus menegaskan bahwa berikalah kepada kaisar apa yang wajib diberikan kepada kaisar dan kepada Allah. Pesan Kristen tentang membangun hubungan dengan orang lain merupakan salah satu inti dari perbuatan kasih yang tampak dari totalitas pesan Injil Kristus yaitu garam dan terang bagi dunia. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membantu tercipta kesejahteraan. Ketaatan terhadap produk hukum serta norma yang telah di susun pemerintah menjadi bukti nyata bahwa orang percaya menghormati kedudukan pemerintah. Gereja Tuhan sebagai bagian dari komponen bangsa ini memiliki tanggung jawab untuk membangun rasa nasionalisme umat, tidak hanya sekadar menjadikannya warga surga seperti idealisme teologi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Harls Evan Siahaan, “Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah: Refleksi Kritis Keluaran 12:1-51,” *DUNAMIS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani)* Vol 1, no. 2 (2017): 39–54, [www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis](http://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis).

Uraian teks Roma 13:1 “tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya”, berkonotasi bahwa warga negara wajib tunduk kepada pemerintah untuk mengatur tatanan kehidupan sejatinya selaras dengan kaidah firman Tuhan agar orang percaya menjauhan diri dari perbuatan melawan hukum. Pemerintah adalah satu badan yang mengatur jalannya pemerintahan suatu Negara, merekalah yang membuat peraturan dan mengatur tatanan yang ada dalam suatu Negara. Kedudukan pemerintah dalam prespektif Alkitab dapat dijelaskan Paulus kepada orang percaya di kota Roma bahwa mereka harus tunduk kepada pemerintah secara “nation state”. Pemerintah merupakan representatif Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya bahwa Alkitab tidak membuat polarisasi yang tajam terkait hubungannya dengan pemerintahan sepanjang masih berada dalam koridor membangun spiritualitas iman. Van den end menulis “pemerintah srebagai hamba Allah (diaken) <sup>29</sup>

Teks Yeremia 29 :7 perihal himbauan nabi Yeremia dengan para penguasa dan rakyat itu menjadi lebih tegang sampai akhirnya Yerusalem jatuh, seperti yang telah dinubuatkan. Nabi-nabi yang optimis sibuk di antara orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel (yaitu, mereka yang dibawa sesudah serangan atas Yerusalem pada tahun 597 SM), juga di antara mereka yang tetap tinggal di Yerusalem. Maksud surat ini ialah membujuk orang-orang di pembuangan agar mendirikan pemukiman di Babel dan puas tinggal di sana; tidak diragukan surat ini ditulis beberapa tahun sesudah 597 SM. Yeremia memberikan saran kepada para raja bangsa-bangsa asing tersebut dan Zedekia untuk menghentikan persepakatan itu, karena mereka tidak ada harapan untuk sukses. Barangkali nasihatnya ada hasilnya. Setidak-tidaknya, kelihatan bahwa pemberontakan itu tidak terjadi pada masa ini. Peristiwa-peristiwa dalam Yeremia 27; 28 terjadi pada tahun keempat pemerintahan Zedekia (bdg. tafsiran atas 25:1); sementara peristiwa-peristiwa dalam Yeremia 29 terjadi pada suatu waktu dalam zaman yang sama. Mereka harus berdoa dan mengusahakan kesejahteraan negeri di mana mereka dibuang, jauh lebih besar lagi alasan bagi kita untuk mendoakan kesejahteraan negeri kelahiran kita, di mana kita hidup sebagai orang-orang merdeka di bawah pemerintahan yang baik, sehingga dalam kesejahteraannya kita dan keluarga kita dapat sejahtera. Setiap penumpang berkepentingan dalam keselamatan kapal.<sup>30</sup>

Pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Allah dipahami sebagai bagian dari iman kristen terhadap keharmonisan hidup. Dalam ekristenan percaya bahwa keteraturan hidup dikerjakan dalam sebuah pemerintahan yang mengeluarkan regulasi peraturan, norma-norma, dan melakukan kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan rakyatnya. Orang Kristen sebagai warga Negara wajib membantu dan berdoa bagi kesejahteraan kota.

### **Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan (*civil education*) Indonesia memasuki gelombang demokrasi ketiga (*the third democracy*) sejak lengsernya resim orba 1998 maka dimulailah iklim demokrasi. Namun ironisnya iklim demokrasi tidak berbanding lurus dengan kenyataan dilapangan karena adanya konflik sosial, praktik KKN yang sangat subur. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar masyarakat mengalami kesejahteraan, kenyamanan dalam berinteraksi satu sama lain tanpa ada ancaman-ancaman dari kelompok masyarakat tertentu. Ancaman demokrasi menjadi ancaman serius bagi

<sup>29</sup> Th Van den end, *Tafsiran Alkitab surat Roma* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997) 602

<sup>30</sup> Aplikasi play store Alkitab tafsiran MYSABDA

bangsa Indonesia karena adanya iklim kebebasan. Demokrasi berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. Proses demokrasi menjadi elemen yang sangat signifikan antar individu, etnis dan golongan mampu mengahrgai kebhinekaan dan menghormati setiap kebutuhan yang diambil satu golongan atau individu. Masyarakat madani memiliki perspektif sendiri dalam perjuangan demokrasi dan memiliki spektrum yang luas dan berjangka panjang. Dalam perspektif masyarakat madani demokratisasi tidak hanya dimaknai sebagai posisi diametral dan antitesa negara, melainkan bergantung pada situasi dan kondisinya. Konsep masyarakat madani selalu berangkat dari permasalahan dan sekaligus konsep tentang individu, sehingga kalau individunya baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat madani maka masyarakatnya akan baik pula.

Gerrith Singgih menulis "keberadaan ekklesia dan eklektos harus dihubungkan dengan konteks penguraian injil matius yang menyinggung mengenai kotbah dibukit pasal 5-7. Ringkasan Taurat mengenai mengasihi Tuhan dan sesama (Mat 22:37-40) dan menolong mereka yang paling hina sebagai wujud pelayanan ibadah kepada Yesus sendiri (mat 25:31-46)<sup>31</sup> Stott menyinggung apakah orang Kristen perlu terlibat dalam perubahan dunia? Stott menulis "Dia Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan (kis 10:38) dan sepanjang sejarah kristiani pengikutNya berbuat sama yakni memberitakan injil sambil memerangi berbagai bentuk kemelaratan individual dan ketimpangan-ketimpangan sosial.<sup>32</sup> Selanjutnya dikatakan Stott bahwa semua pekerjaan *filiantropis*<sup>33</sup> kita artinya pekerjaan yang diilhami oleh kasih sayang kepada manusia tergantung dari penilaian kita terhadap manusia. Semakin tinggi manusia itu kita nilai, semakin besar minat kita melayani kepentingannya<sup>34</sup> Karel Erari menulis risalah dalam konferensi nasional gereja di Salatiga bahwa ada usulan rekomendasi peranan serta fungsi gereja yaitu

Gereja-gereja supaya bersikap kritis dalam menganalisis serta menilai proses modernisasi baik dalam segi-segi positif maupun yang negative. Diserukan agar gereja tetap waspada secara maksimal. Kepada gereja-gereja dianjurkan agar menilai dirinya sendiri dan secara kritis pula memperhatikan sifat dan hakikat dari gereja dalam hubungannya dengan masyarakat. Bagi gereja-gereja yang masih menghadapi tantangan berupa adat serta kebiasaan yang tidak menunjang partisipasi gereja dalam modernisasi supaya dapat diatasi melalui pembinaan dan pendidikan. Supaya dalam menjalankan partisipasinya dalam modernisasi dan tugas pembaharuan gereja senantiasa menjadikan kasih Kristen sebagai norma.<sup>35</sup>

TB Simatupang memandang bahwa Pancasila menjadi ukuran yang ideal dalam konteks Negara kesatuan republik Indonesia. Menurut Simatupang

Pancasila lebih dari sekedar sebuah payung. Ia mempunyai daya tarik nasionalnya tersendiri. Ia menjadi sebuah ideology juga sebagai pandangan hidup. Tiga dari kelima sila yang ada mengingatkan kita pada tiga sila Sun Yat Sen: nasionalisme, demokrasi dan sosialisme.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup> Abdurahman Wahid Dkk, 49

<sup>32</sup> John Stott, *Isu-Isu Global* (Jakarta: Yayasan Bina Kasih OMF 1996) 9

<sup>33</sup> Filiantropis adalah berdasarkan cinta kasih terhadap sesama manusia

<sup>34</sup> John Stott, *Isu-Isu Global*, 9

<sup>35</sup> Karel Erari, *Supaya Engkau Membuka Belenggu Kemiskinan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 35

<sup>36</sup> TB Simatupang, *Iman Kristen Dan Pancasila*. (Jakarta: BPK Gunung Muklia, 1984) 10 Paul Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama*, 21

Stephen Suleeman, dalam presentasi studi institute misology persetia berjudul mengupayakan misi gereja yang kontekstual, editor John Cambell-Nelson, Bendalina Souk menulis “Ada pemahaman pragmatism yang lebih dalam daripada pendekatan yang sangat utilitarian yaitu suatu pemahaman yang tidak sekedar mereduksi agama kepada realitas praktikal, tetapi berusaha menemukan sintesis agama dan praktek kehidupan yang sungguh-sungguh baik<sup>37</sup> Paul Knitter menulis

Saya lebih senang menamakan pendekatan atau model yang saya teliti dalam buku ini sebagai suatu dialog yang korelasional dan bertanggungjawab secara global di antara berbagai agama. saya akan mendesak agar umat beragama berupaya saling mengerti dan berbicara atas dasar komitmen bersama terhadap kesejahteraan umat manusia maupun lingkungan. Karena itu tanggungjawab global mengandung pengertian pembebasan seperti yang maksudkan para teolog pembebasan tradisonal namun melampauinya dalam hal mencari bukan hanya keadilan sosial tetapi keadilan dan kesejahteraan umat manusia dan lingkungan (*eco human well being*).<sup>38</sup>

Elisabet menulis bahwa “agama hanyalah usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan dirinya dan keberadaan alam semesta”<sup>39</sup> Universalisme dalam agama menurut Elisabet melahirkan pemikiran-pemikiran bersama sehingga dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang saling memahami (toleransi) Selanjutnya Elisabet menulis “beribadat bersama memakai lambang keagamaan telah mempersatukan kelompok-kelompok manusia dalam ikatan yang paling erat akan tetapi perbedaan agama telah membantu timbulnya beberapa pertentangan<sup>40</sup> Selanjutnya Elisabet menulis “konsepsi tentang agama merupakan bagian tak terpisahkan dari pandangan hidup mereka sangat diwarnai oleh perasaan mereka yang khas terhadap apa yang dianggap sacral (suci sehingga sukar bagi kita sendiri sebagai orang-orang modern untuk melihat agama dengan kacamata ilmiah yang jujur<sup>41</sup> Weinata Sairin menulis bahwa “rumusan negara dan pemerintah mengisyaratkan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Disini peran pemerintah tetap ditekankan sehingga tiap penduduk dapat memeluk agamanya tanpa rasa takut, tanpa mengalami diskriminasi dan sekaligus dijamin pula untuk mengungapkan keberagamannya”<sup>42</sup>

Menjadi anggota gereja kristen membutuhkan perilaku jujur agar bisa menjadi “garam dan terang” dalam relasi sosiologis masyarakat di Indonesia. Gereja harus berfungsi sebagai pembawa berita kebenaran dan membawa perubahan dalam kerukunan. Relasi-relasi positif dalam mengupayakan kesejahteraan nasional yang digagas oleh gereja akan memposisikan gereja sebagai salah satu agama yang nasionalis pancasilais. Gereja harus tetap menjalankan Marturia-Diakonia-Koinonia yang berimplikasi kepada pembangunan manusia rohani. Dengan demikian ekpektasi mewujudkan kerukunan beragama menjadi urgen dan prioritas. Pada akhirnya implementasi semua orang bisa hidup bersama tanpa ada kecurigaan, dimana tumbuh sikap saling menghormati dan kesediaan bekerja sama demi kepentingan bersama.

---

<sup>37</sup> Stephen Suleeman, *Mengupayakan Misi Gereja Yang Kontekstual*, Studi Institute Misology Persetia, Editor John Cambell-Nelson, Bendalina Souk. Stephen Suleeman, Jakarta: Persetia, 1995) 91

<sup>38</sup> Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama*, 21

<sup>39</sup> Elisabeth Nottingham, *Agama Dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Sairin, 25

Mewujudkan kerukunan hidup secara bersama berarti sikap hati yang terpancar dari kemauan untuk berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun. Semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.

## KESIMPULAN

Masyarakat madani dan kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Mengembangkan toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. Membangun kesepahaman bahwa toleransi-intoleransi-multikultural harus dikelola secara benar untuk menciptakan keharmonisan sosial. Kemajemukan merupakan identitas Indonesia dan masuk penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menghindari kekakuan dalam dialog maka Gereja wajib menerapkan wawasan kebangsaan secara utuh sehingga mampu menciptakan iklim yang kondusif. Gereja mengasumsikan bahwa perspektif Alkitab selaras dengan perintah menjaga kedamaian sosiologis. Gereja menebarkan benih cinta kasih serta menghormati pemerintah. Kerukunan antar beragama merupakan aset yang berharga sekaligus kearifan budaya original Indonesia. Tupoksi untuk menjaga dan mengawal kerukunan merupakan tanggung jawab semua komponen anak bangsa termasuk gereja.

## REFERENSI

- Abdurahman Wahid Dkk, *Dialog: Kritik Dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) Xxi
- Chazali H. Situmorang, [journalsosialsecurity.com/news/toleransi-intoleransimultikultural-sebagai-fatamorgana-kehidupan](https://journalsosialsecurity.com/news/toleransi-intoleransimultikultural-sebagai-fatamorgana-kehidupan)
- Christine Kansil, *Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Delfiyan Widiyanto, *Pembelajaran Toleransi dan Keragaman dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN 2598-5973 11 November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta e-ISSN 2599-008X 109
- Elisabeth Nottingham, *Agama Dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Fanny Yapi Markus Kaseke, subordinasi Allah Tritunggal dalam pengajaran pluralisme, *Missio Ecclesiae* | Volume 10, Nomor 1, (April, 2021)68 *Missio Ecclesiae* ISSN 20865368 (Print)ISSN 2086-5368 (Online)<https://jurnal.i3batu.ac.id/index.php/meVol.10, No.1, pp. 68-82, 2021>
- John Stott, *Isu-Isu Global*, (Jakarta: Yayasan Bina Kasih OMF 1996)
- Jurnal, *Menengok Kembali Peran Agama Di Ruang Publik* Oleh Amin Abdullah (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2017/Issn: 1978-4457 (P), 2548-477x (O)Marinda Wiwi Isnaini, M.Ds. Agustina Kusuma Dewi, S.Sos, M.Ds. Meningkatkan Pemahaman Tentang Penerapan Toleransi Beragama Pada Anak Sekolah Dasar Melalui Buku Interaktif, *Jurnal Rekamakna PPN Institut Teknologi Nasional*, 2
- Jurnal *Istinbath* Nomor 15/Th.Xiv/201535-50: *Agama Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Perspektif Sosilogi Agama)* Middy Boty Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Karel Erari, *Supaya Engkau Membuka Belenggu Kemiskinan*) Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994)

- Litbang PGI, Quraish Shihab, *“Meretas Jalan Teologi Agama-Agama Di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999)
- Mario Chief Taliwuna dan Veydy Yanto Mangantibe, Toleransi Beragama Sebagai Pendekatan Misi Kristen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* Volume 3, Nomor 1, (Juni, 2021): 33-47 ISSN: 2685-1393(p); ISSN:2685-1466
- M. Harudin<sup>1</sup>, Khaidir, H. Rodja Abdul Natsir, *Academy of Education Journal MERAWAT KEBERAGAMAN MENJAGA TOLERANSI MENEROPONG PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SIKKA, Vol. 11 No 2 Tahun 2020*, 168
- Muhammad Sabri, Nofri Andy. TOLERANSI ANTAR UMMAT BERAGAMA DALAM PERSFEKTIF HADIST, *IAIN Bukittinggi, IAIN Bukittinggi*, 20
- Robert John Achermen, *Agama Sebagai Kritik*, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1993) 5
- Sherien Sabbah, Paramita Ayuningtyas, Pemahaman Identitas dan Toleransi Keberagaman Budaya Mahasiswa Sastra Inggris UAI Melalui Puisi Multikultural Kesusasteraan Inggris: Sebuah Kajian Multikulturalism, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 4, No. 2, September 2017*, 96
- Shofiah Fitriani, Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama Analisis: *Jurnal Studi Keislaman* Volume 20, No. 2, Tahun 2020 180-181
- Siahaan, Harls Evan. “Mengajarkan Nasionalisme Lewat Momentum Perayaan Paskah: Refleksi Kritis Keluaran 12:1-51.” *DUNAMIS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani)* Vol 1, no. 2 (2017): 39–54. [www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis](http://www.sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis).
- Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia.*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993)
- Solarse Sopater, *Inti Ajaran Aliran Valentinian*, (Bandung: Bina Media Informasi, 2011)
- Th Van den end, Tafsiran Alkitab surat Roma (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997)
- Aplikasi Alkitab tafsiran MYSABDA
- TB Simatupang, *Iman Kristen Dan Pancasila*. (Jakarta : BPK Gunung Muklia, 1984) 10 Paul Knitter, *Satu Bumi Banyak Agama*,
- Stephen Suleeman, *Mengupayakan Misi Gereja Yang Kontekstual*, Studi Institute Misology Persetia, Editor John Cambell-Nelson, Bendalina Souk. Stephen Suleeman, Jakarta: Persetia, 1995)
- Weinata Sairin, *Gereja, Agama-Agama Dan Pembangunan Nasional*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000)
- Weinata Sairin, *Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002)